

## PERAN BPR JATIM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM DI KOTA SURABAYA GUNA MENCAPAI VISI MISI GUBERNUR JATIM

**Vicky Indarto Setyono**

Karyawan BPR Jatim Surabaya

[vickyindarto28@gmail.com](mailto:vickyindarto28@gmail.com)

**Tri Ratnawati**

Dosen Pengajar Fak. Ekonomi dan Bisnis,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[tri.wdhidayat@yahoo.com](mailto:tri.wdhidayat@yahoo.com)

### ABSTRAK

*BPR Jatim is a bank owned by the East Java Provincial Government and Regency / City Governments throughout East Java. In its role as an intermediary institution and supporting government programs, BPR East Java always strives to increase credit distribution to the real sector, especially micro, small and medium enterprises by offering products tailored to customer needs. This is done because there are still many MSMEs in the city of Surabaya who are experiencing capital difficulties. The limited capital owned by MSMEs will affect the development of MSMEs. BPR Jatim Kota Surabaya has 1,977 customers. This study aims to analyze the role of BPR East Java in increasing the income of MSMEs in the city of Surabaya. The method used in this research is descriptive qualitative. Data were collected using interview, observation and documentation methods. The subjects in this study were customers and employees of BPR Jatim. Then the object is the role of the East Java BPR. The results showed that the East Java BPR plays a very important role in the development of MSMEs in the city of Surabaya. BPR Jatim offers various types of credit products tailored to customer needs. Among the existing types of credit, 70% of East Java BPR customers take special loans. BPR Jatim also provides convenience in terms and procedures for applying for credit and provides the best service for its customers. East Java BPR customers have increased every month. All informants said that their business had developed after receiving credit from the East Java BPR. This development is indicated by an increase in income, additional workforce and more advanced business units.*

**Keywords:** East Java BPR, Income, UMKM

### LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR menerima

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

BPR Jatim adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Bank UMKM merupakan bagian dari Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang memiliki visi “menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar, memiliki sumber daya manusia yang profesional serta memiliki integritas yang tinggi” dan misinya “ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan koperasi di daerah dan pedesaan”. BPR Jatim telah didirikan diseluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

Hal tersebut Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Jatim, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan semangat Gotong Royong”. Sedangkan untuk misi yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang, terdapat tujuh misi, antara lain “keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah” (jatimprov.go.id, 18 Februari 2019). **Bhakti 7 Jatim Berdaya**, yang diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Programnya bermacam-macam, seperti One Village One Product One Corporate & Agropolitan, Communal Branding untuk UMKM, Supply and Demand Channel, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, serta menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan dan perdagangan antar pulau

(wartakota.tribunnews.com, 18 Februari 2019).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian terpenting dalam sistem perekonomian sehingga segala bentuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM sangat perlu di perhatikan dan penting untuk dilakukan karena baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. **Menurut BPS (2019)**, 75,43% UMKM mengaku masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Dari 75,43% UMKM yang mengalami kesulitan usaha tersebut, terdapat tiga permasalahan utama yaitu permodalan (37,13%), bahan baku (24,42%) dan pemasaran (20,76%). Permasalahan permodalan UMKM sangat menyulitkan pelaku UMKM karena terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan lembaga keuangan perbankan. Keterbatasan modal yang dimiliki UMKM akan mempengaruhi perkembangan UMKM. Bagi pelaku UMKM, bank merupakan sumber penting dalam perkembangan usaha. Oleh karena itu, Bank UMKM disini memiliki peran dalam memberikan kredit yang diharapkan dapat membatu kebutuhan permodalan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

**Menurut Bank Indonesia (2015)**, berdasarkan kelompok bank, bank pemerintah masih mendominasi penyaluran kredit UMKM (Rp 56,87 triliun, pangsa 58%). Menurut Bank Indonesia (2014), Kota Surabaya menempati urutan ketujuh di Jawa Timur yang memiliki jumlah UMKM sebanyak 260.762 unit dengan rincian usaha

mikro sebanyak 222.856 unit (urutan kedua belas), usaha kecil sebanyak 31.867 unit (urutan pertama) dan usaha menengah sebesar 6.039 unit (urutan pertama). Selain itu, menurut Bank Indonesia, Penyaluran kredit UMKM tertinggi juga di Kota Surabaya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Agung Budi Prasetyo dengan jabatan sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran BPR Jatim Kota Surabaya, bahwa BPR Jatim Kota Surabaya memiliki jumlah nasabah 1.977 orang. Nasabah BPR Jatim selalu meningkat setiap bulannya.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi BPR yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam memberikan pelayanan kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil. Kendala dan tantangan tersebut adalah (1) struktur pendanaan BPR belum didukung oleh permodalan yang kuat serta keterbatasan dalam menghimpun dana masyarakat, (2) kualitas sumber daya yang belum memadai baik ditingkat manajerial maupun teknis operasional, (3) belum adanya sarana pendukung industri BPR seperti lembaga yang dapat berfungsi sebagai penyangga dana likuiditas bagi BPR, dan (4) lemahnya pengendalian dan inefisiensi kegiatan operasional ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2015).

Dari sisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terlihat masih banyak yang memiliki kinerja keuangan yang kurang baik, ditandai dengan nilai omzet usaha yang rendah, perolehan keuntungan usaha yang rendah, kecilnya penerimaan kas dari kegiatan operasi serta sempitnya daerah pemasaran produk. Menurut pendapat Baswir

sebagaimana dikutip oleh Ariawati, Ria Ratna (2004:50) "ada 4 faktor penyebab utama rendahnya kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yaitu: 1) Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional; 2) Pangsa pasar cenderung menurun karena kekurangan modal, lemahnya teknologi dan manajerial; 3) Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan dari Bank; 4) Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar. Di dalam permasalahan inilah peran BPR bagi masyarakat di daerah perdesaan diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pembiayaan sektor UMK, dengan cara menyalurkan kredit ke UMK dalam jangka panjang dan melakukan pembinaan usaha agar kredit yang diberikan dapat memperbaiki kinerja keuangan UMK penerima kredit tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran BPR Jatim dalam Peningkatan Pendapatan UMKM di Kota Surabaya guna mencapai Visi Misi Gubernur Jatim". Agar penelitian lebih fokus dan terarah maka peneliti merumuskan masalah bagaimana peran BPR Jatim dalam peningkatan pendapatan UMKM di Kota Surabaya guna mencapai Visi Misi Gubernur Jatim? dan bagaimana pendapatan UMKM di Kota Surabaya apakah sudah sesuai dengan visi misi Gubernur Jatim? Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPR Jatim dalam peningkatan pendapatan

UMKM di Kota Surabaya guna mencapai Visi Misi Gubernur Jatim.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

#### 1. Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Penyaluran dana masyarakat dilakukan BPR dalam bentuk pemberian kredit kepada UMK dan masyarakat pedesaan. Kredit yang disalurkan oleh BPR kepada UMK sebagian besar berupa kredit modal kerja (KMK) yang dibagi lagi dalam beberapa jenis sesuai dengan bidang usaha UMK penerima kredit yaitu:

- a. KMK sektor perdagangan
- b. KMK sektor industri
- c. KMK sektor pertanian
- d. KMK sektor jasa

Selain kredit modal kerja, sebagian kecil oleh BPR disalurkan dalam bentuk kredit konsumtif untuk beberapa nasabah perorangan.

### Usaha Mikro dan Kecil

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengertian Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria dari Unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah: ASSET OMZET MIKRO Max 50 Jt Max 300 Jt KECIL > 50 jt - 500 jt > 300 jt - 2,5 M

### Pendapatan

Pendapatan Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Selain itu Neo Klasik juga menyatakan bahwa tenaga kerja memperoleh penghasilan senilai dengan pertambahan hasil marginalnya.<sup>20</sup> Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku pada saat itu.<sup>21</sup> Menurut Nababan (2009, hlm.17) pendapatan

atau income masyarakat adalah hasil penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi dan sektor ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, hlm. 23) pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto, manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Menurut Skousen dan Stice (Akbar 2009, hlm 563) pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan uang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung. Menurut Budiono, secara singkat faktor pendapatan seorang warga masyarakat ditentukan oleh: 1) Jumlah faktor produksi yang ia miliki yang bersumber dari: - Hasil tabungan dari tahun lalu - Warisan dan pembelian 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi.<sup>22</sup> Harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar produksi. dalam penelitian ini menggunakan konsep penghasilan antara jumlah output yang dijual dengan tingkat harga tertentu. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

Keterangan:

TR = Total Pendapatan dari hasil pendapatan pada tingkat harga tertentu

P = Harga barang yang dihasilkan per unit

Q = Jumlah barang yang mampu dihasilkan

### Kesejahteraan Masyarakat

Teori kesejahteraan menurut ekonomi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory, dan new contractarian approach (Albert dan Hahnel, dalam Ratnawati, Rohmasari, dan Lokajaya, 2017). Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan (pleasure) atau kepuasan (utility) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.

Albert dan Hahnel (Sugiarto, dalam Ratnawati, Mujanah, dan Lokajaya, 2018) mengklasifikasikan teori kesejahteraan menjadi tiga macam, yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach. Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan (pleasure) atau kepuasan (utility) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat

kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebesar mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.

Neoclassical welfare theory merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip Pareto Optimality. Prinsip Pareto Optimality menyatakan bahwa the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off. Prinsip tersebut merupakan necessary condition untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Konsekuensi sosial dapat ditentukan berdasarkan pilihan-pilihan subyektif yang dibuat para individu. Semakin besar kisaran pilihan yang tersedia, maka semakin besar level kesejahteraan yang dicapai, jika keadaan lain tidak berubah (Coporaso dan Levine, dalam Ratnawati, Mujanah, dan Lokajaya, 2018). Selain prinsip Pareto optimality, neoclassical welfare theory juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Kesejahteraan kelompok (masyarakat) dapat ditingkatkan melalui kesejahteraan individu. Apabila individu berhasil memuaskan kebutuhannya maka kesejahteraan kelompok (masyarakat) akan tercapai.

Prinsip dalam pendekatan new contractarian approach adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Intisari

pendekatan ini adalah setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang tanpa adanya campur tangan (Ratnawati, Mujanah, dan Lokajaya, 2018).

Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan ke dalam dua tipe (Suyoto, dalam Ratnawati, Rohmasari, dan Lokajaya, 2017), yaitu Pertama, Tipe Keluarga Pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga pra sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif berdasarkan indepth interview (wawancara secara mendalam) (Ratnawati, Mujanah, dan Lokajaya, 2018). Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti dan pendekatan kualitatif mampu menggali

pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis peran BPR Jatim dalam peningkatan pendapatan UMKM guna mencapai Visi Misi Gubernur Jatim dan peningkatan pendapatan UMKM di Kota Surabaya secara mendalam dan alami tanpa adanya manipulasi baik dari peneliti maupun pihak lain. Hasil dari penelitian ini akan dijabarkan secara detail dalam bentuk narasi dan tabel agar pembaca dapat memahami peran BPR Jatim dalam pemberian kredit UMKM dan peningkatan pendapatan UMKM setelah menerima kredit dari BPR Jatim.

Penelitian ini dilakukan di UMKM dan BPR Jatim Kota Surabaya. Sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah dan pegawai Bank BPR Jatim Kota Surabaya. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling*. Dalam penelitian ini pada awalnya akan ada 9 informan yang terdiri atas 6 pelaku UMKM yang menerima kredit dari BPR Jatim kemudian 3 orang pegawai BPR Jatim. Namun, karena 6 informan ini belum memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti, maka peneliti menambah informan untuk dapat memberikan jawaban secara lengkap. Oleh karena itu, yang pada awalnya hanya ada 9 informan, akhirnya terdapat 13 informan yang dapat memberikan jawaban secara lengkap sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Menurut Sugiyono (2013:223), dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti

sendiri, namun setelah fokus penelitian jelas, memungkinkan adanya instrumen penelitian tambahan sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Sehingga instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, kamera dan perekam suara. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN

BPR Jatim merupakan bank perkreditan rakyat yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. BPR Jatim adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Perkembangan BPR Jatim sangat pesat, di mana pada tahun 2000 memiliki 1 Kantor Pusat, 21 Kantor Cabang dan 35 Kantor Kas, pada tahun 2015 mencapai peningkatan yang luar biasa. Saat ini, BPR Jatim memiliki 1 Kantor Pusat, 31 Kantor Cabang, 112 Kantor Kas, 3 Payment Point, 35 ATM, dan 32 Mobil Kas Keliling yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

BPR Jatim menyediakan produk yang beragam jenisnya mulai dari tabungan, kredit dan deposito yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal kredit, BPR Jatim memberikan penawaran berbagai jenis kredit yang dapat dipilih oleh pelaku UMKM, mulai dari kredit KRIDAMAS, kredit KUSUMA, kredit MULTIGUNA, kredit

MULUS, kredit HIPPAMS, kredit Kepala Lembaga Keuangan Mikro, kredit KUIP/S, dan kredit Channeling Dana Bergulir. Dalam peranannya sebagai lembaga yang mendukung program Pemerintah, BPR Jatim selalu berupaya meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil utamanya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM-K) yang bersifat *Pro Growth, Pro Job, Pro Gender, Pro Poor Pro Business*. Dengan adanya BPR Jatim yang didirikan di seluruh daerah Jawa Timur ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan terutamanya dalam hal permodalan bagi pelaku UMKM sehingga provinsi Jawa Timur mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

BPR Jatim Kota Surabaya memiliki lima kantor kas yang berada di Kecamatan Lakarsantri, Tandes, Wonokromo, Rungkut dan Tegalsari. Total nasabah kredit di Bpr Jatim Kota Surabaya yaitu sebanyak 1.977 nasabah. Dari 1.977 nasabah tersebut hanya 0,4% atau sebanyak 774 nasabah yang memiliki karakter kredit kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai peran BPR Jatim dalam peningkatan pendapatan UMKM di Kota Surabaya. Berikut adalah data informan penelitian:

**Tabel 1. Data Informan**

No	Nama	Usia (th)	Jenis usaha	Keterangan
----	------	-----------	-------------	------------

1.	Ainur Rahma Alfathy	37	Pemasangan CCTV	Nasabah
2.	Ach Wahyu Dzikri H A	41	Tambal ban dan toko	Nasabah
3.	Toemirah	38	Toko roti	Nasabah
4.	Sukma Sunandri	48	Persewaan mobil	Nasabah
5.	Baitul Rohman	35	Toko kelontong	Nasabah
6.	A. Choirul Anam	37	Fotocopy dan print	Nasabah
7.	Vici Harumi	58	Penjual es	Nasabah
8.	Sri Devi	40	Toko kelontong	Nasabah
9.	Anang Dwi Armanto	42	Warung makan	Nasabah
10.	Hadi Prasetyo	59	Foto studio dan shooting	Nasabah
11.	Dwiky Arief R Y	29		Pegawai
12.	Inu Parwito	37		Pegawai
13.	Hafizh Mufid W	27		Pegawai

Sumber: data primer penelitian 2020, data diolah

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 informan yang terdiri atas 10 nasabah dan 3 pegawai BPR Jatim. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui kuantitas nasabah dalam menerima kredit dan penggunaan kredit yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Kuantitas Menerima Kredit dan Penggunaan Kredit Nasabah Bank UMKM**

No	Nama	Kuantitas Menerima Kredit	Penggunaan Kredit
1	Ainur Rahma Alfathy	3	Tambahan modal usaha
2	Ach Wahyu Dzikri H A	2	Membeli kompresor dan tambahan modal usaha
3	Toemirah	1	Membangun toko dan tambahan modal usaha
4	Sukma Sunandri	2	Tambahan modal usaha
5	Baitul Rohman	2	Tambahan modal usaha
6	A. Choirul Anam	2	Membeli mesin fotocopi dan tambahan modal usaha
7	Vici Harumi	1	Tambahan modal usaha
8	Sri Devi	2	Tambahan modal usaha
9	Anang Dwi Armanto	1	Sewa stand dan tambahan modal usaha
10	Hadi Prasetyo	3	Membeli kamera dan tambahan modal usaha

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata informan telah menerima kredit lebih dari satu kali dan digunakan untuk tambahan modal usaha. Dari



sepuluh informan tersebut, dua informan mengaku baru sekali menerima kredit, enam informan sudah dua kali menerima kredit dan dua informan lainnya sudah tiga kali menerima kredit. Kesepuluh informan ini usahanya mengalami perkembangan setelah menerima kredit. Hal ini dapat dilihat pula pada tabel 4.2 dimana pendapatan informan mengalami peningkatan setelah menerima kredit dari BPR Jatim.

Pak Ach Wahyu Dzikri H A merupakan salah satu informan yang sudah dua kali menerima kredit dari BPR Jatim. Kredit yang diterimanya ini digunakan untuk tambahan modal usaha. Dulu beliau memiliki bengkel kecil yang melayani tambal ban dan toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Beliau pernah mengajukan kredit di beberapa Bank namun ditolak, hanya di BPR Jatim ini pengajuan kreditnya diterima. Setelah menerima kredit dari BPR Jatim, usaha Pak Ach Wahyu Dzikri H A semakin berkembang. Kredit yang diterimanya ini digunakan untuk membeli kompresor yang ukurannya lebih besar dibandingkan miliknya dulu. Selain itu digunakan untuk membeli peralatan yang bengkel yang lebih lengkap dan juga menambah barang-barang yang dijual tokonya. Sehingga saat ini bengkel Pak Ach Wahyu Dzikri H A tidak hanya melayani tambal ban tetapi juga servis kendaraan bermotor. Begitu pula dengan tokonya juga menyediakan berbagai jenis kebutuhan baik pokok maupun tambahan.

Selain Pak Ach Wahyu Dzikri H A, Bapak A. Choirul Anam memiliki usaha foto copy juga telah menerima kredit dari BPR Jatim

sebanyak dua kali. Beliau mengaku usahanya mengalami perkembangan setelah menerima kredit dari BPR Jatim. Kredit yang Bapak A. Choirul Anam terima digunakan untuk membeli mesin foto copy dan juga melengkapi ATK yang dijual. Untuk menjalankan usahanya ini, Bapak A. Choirul Anam dibantu oleh saudara dan satu orang anaknya setelah pulang sekolah. Dulu Bapak A. Choirul Anam hanya memiliki satu mesin foto copy dan menjual ATK. Setelah menerima kredit dari BPR Jatim, saat ini beliau telah memiliki dua mesin foto copy dan satu printer. Karena ada tambahan satu mesin foto copy dan printer, hal itu jelas menjadikan pendapatan Bapak A. Choirul Anam bertambah dibandingkan sebelum menerima kredit. Berdasarkan tabel 3, pendapatan Bapak A. Choirul Anam meningkat sebanyak empat kali lipat. Hal tersebut dikarenakan beliau pandai dalam mengatur kredit yang diterimanya.

Pak Hadi Prasetyo adalah nasabah BPR Jatim yang telah menerima kredit sebanyak tiga kali. Beliau memiliki usaha foto studio dan shooting. Kredit yang diterima oleh Pak Hadi Prasetyo digunakan untuk membeli perlengkapan usahanya seperti kamera, film, tripod dan lain-lain. Dengan adanya tambahan kamera dan tenaga kerja yang dimiliki Pak Hadi Prasetyo, hal tersebut menjadikan usaha beliau semakin berkembang dan secara tidak langsung pun pendapatannya meningkat. Pendapatan Pak Hadi Prasetyo meningkat jauh melebihi pendapatan sebelumnya. Bahkan saat ini beliau juga berencana untuk membuka cabang lagi di daerah Ngagel.

Berikut ini adalah jumlah kredit dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh 10 nasabah selaku informan di BPR Jatim di Kota Surabaya dalam setiap bulannya.

Tabel 3. Jumlah kredit dan pendapatan nasabah Bank UMKM

No	Nama	Kredit yang Diterima (Rp)	Pendapatan Rata-Rata Per Bulan (Rp)		Keterangan
			Sebelum Menerima Kredit	Sesudah Menerima Kredit	
1.	Ainur Rahma Alfathy	20.000.000	3.000.000	20.000.000	Meningkat
2.	Ach Wahyu Dzikri H A	30.000.000	3.500.000	20.000.000	Meningkat
3.	Toemirah	20.000.000	3.000.000	6.000.000	Meningkat
4.	Sukma Sunandri	100.000.000	15.000.000	75.000.000	Meningkat
5.	Baitul Rohman	10.000.000	3.500.000	9.000.000	Meningkat
6.	A. Choirul Anam	17.000.000	3.000.000	12.500.000	Meningkat
7.	Vici Harumi	8.000.000	2.500.000	5.000.000	Meningkat
8.	Sri Devi	15.000.000	5.000.000	13.000.000	Meningkat
9.	Anang Dwi Armanto	15.000.000	4.000.000	9.000.000	Meningkat
10.	Hadi Prasetyo	70.000.000	5.000.000	60.000.000	Meningkat

Sumber: wawancara dengan 10 informan (Maret 2020)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari kesepuluh informan yang telah diwawancarai menyatakan pendapatannya meningkat setelah menerima kredit usaha dari BPR Jatim. Meskipun jumlah nominal kredit yang mereka terima berbeda-beda tetapi mereka merasa sudah sangat terbantu dengan adanya kredit dari BPR Jatim ini.

Ibu Vici Harumi merupakan satu dari sepuluh informan nasabah yang jumlah kreditnya terkecil yaitu Rp 8.000.000,00. Beliau menyatakan bahwa pendapatannya meningkat setelah menerima kredit dari BPR Jatim. Beliau baru pertama kali menerima kredit dari BPR Jatim dan berniat untuk melakukan kredit kembali ketika kredit pertamanya telah lunas. Kredit yang diterima oleh Ibu Vici Harumi ini digunakan untuk tambahan modal usaha

berjualan es, seperti memperbaiki tempat usaha dan menambah jenis es yang dijual. Dulu beliau hanya berjualan di atas meja biasa dan hanya menjual es campur, tetapi setelah menerima kredit ini beliau berjualan didepan rumah dengan menggunakan gerobak, ada tempat untuk minum es di tempat dan jenis es yang dijual semakin banyak yaitu ada es campur, es degan, es oyen dan es kacang hijau. Pada awalnya Ibu Vici Harumi ini bejualan hanya untuk mengisi waktu luangnya, saat ini ibu Vici Harumi sudah mengumpulkan uang sedikit sedikit untuk membuat usahanya lebih berkembang. Beliau ingin menyewa stand yang berada di daerah pasar Rungkut agar pendapatannya dapat lebih meningkat.

Ibu Sukma Sunandri merupakan informan yang jumlah kreditnya tertinggi yaitu Rp 100.000.000,00. Sama halnya dengan Ibu Vici Harumi, Ibu Sukma Sunandri juga menyatakan bahwa pendapatannya mengalami peningkatan setelah menerima kredit dari BPR Jatim. Ibu Sukma Sunandri memiliki usaha persewaan mobil. Pada awalnya Beliau hanya memiliki dua mobil namun setelah menerima kredit dari BPR Jatim sebanyak dua kali, saat ini mobilnya berjumlah lima unit. Kredit yang diterimanya dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat membantu usahanya berkembang. Ibu Sukma Sunandri ini tertarik mengajukan kredit di BPR Jatim karena saat pertama kali melakukan pinjaman, Beliau mengaku syarat dan prosedurnya mudah tidak seperti Bank lainnya. Selain itu, Beliau juga senang dengan pelayanan yang diberikan oleh para pegawai BPR Jatim karena para pegawai disini

mau diajak untuk berdiskusi tentang pengembangan usaha.

Sedangkan Ibu Toemirah merupakan nasabah yang baru sekali menerima kredit dari BPR Jatim dengan nominal Rp 20.000.000,00. Jumlah kredit yang diterima oleh Ibu Toemirah tidaklah sedikit namun peningkatan pendapatannya lebih sedikit dibandingkan Bapak Anang Dwi Armanto yang hanya menerima kredit Rp 15.000.000,00. Peningkatan pendapatan Ibu Toemirah hanya sebesar Rp 3.000.000,00 sedangkan peningkatan pendapatan Bapak Anang Dwi Armanto mencapai Rp 5.000.000,00. Hal tersebut terjadi karena kredit yang diterima oleh ibu Toemirah lebih banyak digunakan untuk membangun toko roti dan kurangnya kemampuan dalam mengelola kredit yang telah diterimanya. Sehingga mengakibatkan kredit yang diterimanya kurang dapat berperan secara maksimal.

Pak Ainur Rahma Alfathy adalah pemilik usaha pemasangan CCTV. Pak Ainur Rahma Alfathy telah menerima kredit dari Bank UMKM sebanyak tiga kali. Setelah menerima kredit dari BPR Jatim, Beliau mengatakan bahwa usahanya semakin berkembang karena saat ini beliau telah memiliki dua orang pekerja. Dengan adanya tambahan pekerja ini maka pendapatan Pak Ainur Rahma Alfathy pun meningkat hingga hampir tujuh kali lipat pendapatannya sebelum menerima kredit dari BPR Jatim. Meskipun pekerjanya bertambah dan pengelurannya semakin banyak, namun hal tersebut tidak menjadikan usaha Pak Ainur Rahma Alfathy menurun tetapi malah

semakin berkembang karena dengan adanya tambahan tenaga kerja maka pendapatan yang diperoleh semakin banyak dan kesempatan menerima pekerjaan dari orang yang membutuhkan juga semakin banyak. Oleh karena itu, Pak Ainur Rahma Alfathy sudah sampai tiga kali mengajukan kredit di BPR Jatim karena beliau ingin usahanya bisa lebih berkembang.

### **Peran BPR Jatim**

BPR Jatim ini merupakan implementasi UU No. 20 tahun 2008 pasal 7 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi salah satu aspeknya adalah pendanaan. Dimana dijelaskan dalam pasal 8 bahwa aspek pendanaan dilakukan dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan memberikan kemudahan dalam perolehan kredit. BPR Jatim disini memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengakses kredit secara cepat, tepat dan murah sesuai dengan slogannya.

Sesuai dengan misinya, BPR Jatim selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya. Mulai dari penyediaan produk-produk perbankan yang beraneka ragam jenisnya terutama untuk produk kredit, dimana produk ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sehingga nasabah dapat memilih kredit sesuai dengan yang dibutuhkan. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan selalu diinovasi, pada

awalnya hanya ada kredit kusuma, kridamas, kretamas dan kredit dana bergulir. Namun, saat ini telah bertambah yaitu menjadi kredit KRIDAMAS, kredit KUSUMA, , kredit MULTIGUNA, kredit MULUS, kredit HIPAMAS, kredit Kepala Lembaga Keuangan Mikro, kredit KUIP/S, dan kredit Channeling Dana Bergulir. Selain itu, syarat pengajuan kredit mudah dipenuhi yang terpenting memiliki usaha minimal telah berdiri selama satu tahun dan prosedurnya juga tidak berbelit-belit sehingga untuk kepastian penerimaan pengajuan kredit maksimal tujuh hari kerja. Namun untuk pencairannya sekarang memang sedikit lebih lama dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan ada perubahan peraturan perbankan yang semakin diperketat untuk meminimalisir resiko yang ada. Di BPR Jatim ini jenis kredit yang banyak diambil oleh nasabah adalah kredit kusuma dengan prosentase 70%. Hal ini dikarenakan kredit kusuma adalah kredit untuk semua usaha masyarakat yang diberikan untuk umum, pegawai negeri, calon pegawai negeri, pensiunan dan karyawan swasta. Keunggulan dari kredit ini adalah suku bunga kompetitif dan jangka waktu kredit maksimal selama delapan tahun.

BPR Jatim selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya. Strategi ini dilakukan agar nasabah BPR Jatim tetap setia dengan BPR Jatim dan lebih banyak lagi pelaku usaha yang tertarik untuk menjadi nasabah BPR Jatim. Pelayanan BPR Jatim tersebut seperti, mempermudah pengajuan kredit kembali namun tetap sesuai dengan prosedur, mengambil angsuran ke rumah-rumah nasabah,

menjaga komunikasi dengan nasabah dan selalu siap membantu kesulitan nasabah.

Suku bunga kredit BPR Jatim lebih rendah dibandingkan bank lainnya. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang memilih untuk melakukan kredit di BPR Jatim. Selain alasan tersebut, alasan lainnya yaitu karena BPR Jatim memberikan fasilitas kemudahan dalam pengajuan kredit untuk UMKM dan BPR Jatim juga mampu memberikan pelayanan lebih yang tidak diberikan oleh Bank lainnya. Sehingga banyak pelaku usaha yang tertarik untuk melakukan kredit di BPR Jatim dan setiap bulan nasabah BPR Jatim juga mengalami peningkatan. Hal tersebut diperkuat oleh laporan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2013:53) yang menyatakan, "kemudahan akses pinjaman menjadi prioritas UMKM dalam memilih lembaga pembiayaan."

### **Pendapatan UMKM Kota Surabaya**

Jumlah nasabah BPR Jatim kota Surabaya setiap bulannya mengalami peningkatan. Pada akhir Desember 2019 jumlah nasabah BPR Jatim sebanyak 1.977, pada triwulan pertama di tahun 2020 nasabah BPR Jatim ada peningkatan sebanyak 890 nasabah. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap bulan jumlah nasabah BPR Jatim selalu mengalami peningkatan.

Nasabah penerima kredit BPR Jatim digolongkan menjadi dua jenis yaitu nasabah pemilik usaha perdagangan barang dan nasabah pemilik usaha perdagangan jasa. Nasabah pemilik usaha perdagangan barang seperti toko

kelontong, toko roti, penjual es dan warung makan menggunakan kreditnya untuk tambahan modal usaha dalam bentuk menambah jumlah barang yang dijualnya. Selain untuk tambahan modal usaha, kredit yang diterima Bapak Anang Dwi Armanto digunakan untuk menyewa stand makanan. Sedangkan nasabah pemilik usaha jasa menggunakan kreditnya untuk membeli dan melengkapi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam usahanya, diantaranya yaitu kompresor, mesin fotocopi dan kamera.

Pemberian kredit usaha yang disalurkan BPR Jatim ini secara garis besar dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, dimana pendapatan ini merupakan kriteria penilaian pengembangan usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2008:88-90) dimana kredit memiliki manfaat bagi pelaku usaha sebagai sumber atau tambahan modal untuk menjaga kelangsungan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, secara tidak langsung juga meningkatkan pendapatan dan laba usaha sehingga nasabah mempunyai kesempatan untuk memperoleh fasilitas perbankan yang lain, seperti peningkatan jumlah pinjaman. Hal tersebut telah sesuai dengan Visi Misi Gubernur Jatim yang mana untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, guna mensejahterakan masyarakat.

Kredit memiliki peran yang penting dalam pengembangan usaha. Seluruh informan nasabah mengatakan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada usahanya. Selain itu, empat nasabah juga mengatakan bahwa tenaga kerja yang dimiliki bertambah

setelah menerima kredit dari BPR Jatim. Tidak hanya itu, dengan menerima kredit dari BPR Jatim juga dapat membantu pelaku usaha mengenalkan produk-produknya dengan mengikuti kegiatan pameran dan bazar BPR Jatim. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Mayuni dan Rustariyuni (2015) dimana bantuan dalam bentuk kredit modal kerja akan membantu pengusaha BPR Jatim dalam meningkatkan kinerja usaha, baik meningkatkan pendapatan, tenaga kerja, produksi dan biaya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai "Peran BPR Jatim dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kota Surabaya", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPR Jatim sangat berperan dalam peningkatan pendapatan UMKM di wilayah Kota Surabaya sesuai dengan Visi Misi Gubernur Jatim yang mana untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, guna mensejahterakan masyarakat. BPR Jatim menawarkan berbagai jenis produk kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari kredit KRIDAMAS, kredit KUSUMA, kredit multiguna, kredit MULUS, kredit HIPAMAS, kredit Kepala Lembaga Keuangan Mikro, kredit KUIP/S, dan kredit Channeling Dana Bergulir. Diantara jenis kredit tersebut, kredit yang banyak diambil oleh para pelaku UMKM adalah kredit KUSUMA dengan prosentase sebesar 70%. Bank ini juga mampu memberikan kemudahan dalam

syarat dan prosedur pengajuan kredit. Selain itu, BPR Jatim juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk para nasabahnya.

- Nasabah BPR Jatim setiap bulannya mengalami peningkatan. Pada Bulan Desember 2019 jumlah nasabah BPR Jatim sebanyak 1.977 nasabah kemudian pada triwulan pertama di tahun 2020 nasabah BPR Jatim ada peningkatan sebanyak 890 nasabah. Nasabah BPR Jatim rata-rata telah menerima kredit sebanyak dua kali dan digunakan untuk tambahan modal usaha. Keseluruhan nasabah mengatakan usahanya mengalami perkembangan setelah menerima kredit dari BPR Jatim. Perkembangan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan hingga dua sampai delapan kali lipat, penambahan tenaga kerja dan unit usaha semakin maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013. Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM, (online), (<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/analisis-peran-lembaga-1425035886.pdf>, diunduh 16 November 2015).
- Badan Pusat Statistik(online), (<http://www.bps.co.id/>, diakses 20 Oktober 2015).
- Bank Pekreditan Rakyat Jawa Timur (online), ([www.bprjatim.co.id](http://www.bprjatim.co.id), diakses 20 Oktober 2015).
- Bank Sentral Republik Indonesia (online), (<http://www.bi.go.id/>, diakses 26 Januari 2016)
- Bank Sentral Republik Indonesia. 2014. Program bank Indonesia dalam Mendukung Kinerja UMKM. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV.
- Boediono. 2010. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE.
- Budi Santoso, Totok dan Nuritomo. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dinas Koperasi dan UMKM, (online), (<http://www.diskopumkm.jatim.go.id>, diakses 20 Oktober 2015).
- Direktorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga. 2013. Profil Industri Mikro dan Kecil 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2008. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hubeis, Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kara, Muslimin. 2013. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, (online), Vol 47, No. 1, (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=1760>)

- [00&val](#) = 328, diunduh 16 November 2015).
- Karya bersama Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan Forum Daerah UKM Jawa Timur. Andi Irawan dan Bayu Airlangga Putra (Ed). 2007. *Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mayuni, Made Ary dan Surya Dewi Rustariyuni. 2015. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. (Online), vol 4, No 12 (<http://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/viewFile/.../1267>, diunduh pada 26 Januari 2016).
- Moleong, Lexy J.. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purhantara, Wahyu. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratnawati, Mujanah, dan Lokajaya, 2018. "Edukasi Strategi Financial Inclusion Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Industri Kawasan Wisata Kabupaten Gresik Jawa Timur", *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya*, Vol. 03, No. 02, hal 83 – 91.
- Ratnawati, Rohmasari, dan Lokajaya, 2017. "Strategi *Financial Literacy & Financial Inclusion* Sebagai Trigger Kesejahteraan Masyarakat Industri Kecil Kawasan Wisata Giri Kabupaten Gresik Jawa Timur", *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya* Vol. 02, No. 01, hal 57 – 64.
- Saiman, Leonardus. 2011. *Kewirausahaan: Teori, Praktek dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Ayuditya Widha Kurnia dan Nenik Woyanti. 2013. "Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus: Nasabah Bank Jateng Cabang Boyolali)". *Diponegoro Journal of Economics*. Vol. 3, No. 1. (online). (<http://eprints.undip.ac.id/42053/1/SARI.pdf>, diunduh pada 29 Januari 2015).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setyobudi, Andang. 2007. "Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah". *Buletin Hukum dan Kebanksentralan* Vol.5 No. 2 Agustus 2014, (online), (<http://banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturanBI/PeranSertaBIdlmPengembUMKMANdangSetyobudiSE.pdf>, diakses 20 Oktober 2015).
- Simanjuntak, P., 1990. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE UI.
- Simorangkir, O. P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Standar Akuntansi Keuangan, Agustus 1994.

- Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Warkum. 2004. Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suroto, 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Yogyakarta: GMU Press.
- Ulum, Miftahul. 14 Mei 2014. "Bank UMKM Jatim Akuisisi Kredit Mikro Rp 500 Miliar". Dalam *Bisnis Jawa Timur*, (online), (<http://surabaya.bisnis.com/read/20140514/11/71369/bank-umkm-jatim-akuisisi-kredit-mikro-rp500-miliar>), diakses pada 22 Februari 2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Widyaresti, Enggar Pradipta dan Achma Hendra Setiawan. 2012. "Analisis Peran BRI Unit Ketandan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten". *Jurnal Ekonomi*, (online), (<http://eprints.undip.ac.id/37382/1/Widyaresti.pdf>), di unduh pada 29 Januari 2016).
- Zaki Baridwan, 2011. *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-masalah Khusus*, Edisi 1, Yogyakarta: BPFE.